

TRANSFORMASI KONFLIK SOSIAL ANTARA ETNIS BALI DAN LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI BALINURAGA, KECAMATAN WAY PANJI, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

CONFLICT TRANSFORMATION BETWEEN BALINESE ETHNIC AND LAMPUNG ETHNIC, IN BALINURAGA VILLAGE, WAY PANJI DISTRICT, LAMPUNG SELATAN REGENCY, IN REALIZING SUSTAINABLE PEACE

Akbar Kurniadi¹, Tri Legionosuko², dan Wibisono Poespitoahadi³

Universitas Pertahanan Indonesia
(akbarkurniadi66@gmail.com, tri.legionosuko@idu.ac.id,
dan wibisonolp2m@gmail.com)

Abstrak – Artikel ini menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka, serta bagaimana upaya transformasi konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat Lampung, dengan konflik Balinuraga tahun 2012, masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural, dan struktural demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional.

Kata Kunci : konflik, transformasi konflik, suku bangsa, budaya, dan perdamaian

Abstract – This article analyses the various factors that caused latent conflict in Balinuraga to be manifest conflict, also how conflict transformation is carried out to change conflictual conditions to be harmonious, destructive to constructive. Indonesian Survey Circle (LSI) noted that Lampung entered into five (5) regions with the worst levels of discrimination after reformation. So, researcher feels the need to raise the theme of conflict transformation in Balinuraga as the title and subject matter of this paper. This research was conducted using qualitative methods by collecting data through interviews, observation and documentation. Researcher used several theories and concepts, such as Conflict Theory, Conflict Transformation Theory, Cooperation Theory, Social Identity Theory, ABC Triangle Concept Galtung Conflict, SAT Concept, and Peace Concept. The results showed that conflict in Balinuraga was triggered by juvenile delinquency, extended with the issue of ethnicity and arrogance

¹ Mahasiswa Pascasarjana Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

² Rektor Universitas Pertahanan.

³ Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pertahanan.

between groups as an accelerator, and was motivated by transmigration policies and the issue of economic inequality as structural factors. Conflict transformation efforts are carried out in four dimensions, namely personal, relational, cultural, and structural in order to realize sustainable peace and national security.

Keywords: conflict, conflict transformation, ethnicity, culture, and peace

Pendahuluan

Muncul beragam perspektif terkait kronologis sebab munculnya konflik kekerasan di Balinuraga, Lampung Selatan, Oktober 2012. Berdasarkan data SNPK tahun 2012, The Habibie Center, bahwa konflik kekerasan yang mampu mengerahkan massa penduduk lokal Lampung dari desa di sekitar Kecamatan Way Panji dan seluruh penjurur Provinsi Lampung, dipicu oleh insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis Lampung, bernama Nurdiyana Dewi (18 tahun), warga Desa Agom Kecamatan Kalianda, dan Emiliya Elisa (17 tahun), warga Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda, pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIB.⁴

Kronologi peristiwa konflik kekerasan di Balinuraga bermula saat kedua gadis Lampung, Diana dan Emi, berboncengan mengendarai sepeda motor usai berbelanja peralatan *make up* pada sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati segerombolan pemuda Balinuraga yang sedang menunggangi sepeda (Data SNPK,

mencatat terdapat 10 orang pemuda Balinuraga). Tidak disangka seorang pemuda berusaha memegang paha Emi. Emi, yang posisinya dibonceng oleh Diana, berusaha menepisnya. Namun, karena jumlah pemuda yang lebih banyak, fokus dan keseimbangan Diana buyar sehingga sepeda motornya terjatuh.⁵

Kemudian, berkerumunlah massa yang datang dari desa tetangga bersiap untuk memberi pelajaran pada pemuda Balinuraga yang dianggap sudah keterlaluan dan menghina *pi'il* atau harga diri suku Lampung.⁶ Inilah salah satu alasan mengapa konflik menjadi membesar, yaitu dalam tata kehidupan sosialnya, orang Lampung memegang prinsip *Pi'il Pesenggiri* yang menempatkan harga diri dalam posisi tertinggi. Sehingga, ketika mereka merasa harga dirinya telah dicerai oleh kelompok lain, maka akan sangat mungkin terjadi gesekan sosial yang memicu terjadinya konflik terbuka.

Kabar menyebar lebih cepat dari perkiraan, pada hari Minggu, 28 Oktober 2012, ratusan orang berkumpul kembali di perempatan Jalan Way Harong. Kali ini massa berdatangan hingga dari luar Lampung Selatan. Mereka melakukan penyerangan dan akhirnya konflikpun tak

⁴ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 6 Maret 2014, hlm. 14.

⁵ Budisantoso Budiman & Oyos HN, Saroso, *Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

dapat dihindari, akibatnya tiga meninggal. Pada hari ketiga, Senin 29 Oktober 2012, konflik kekerasan dalam skala besar semakin tidak dapat dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI yang berjumlah 2.100 personel, sedangkan jumlah massa mencapai belasan ribu.⁷ Akhirnya konflik memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian materil yang cukup besar.

Terjadinya konflik kekerasan antar etnis di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun belum cukup kuat dalam menopang dan mengukuhkan integrasi sosial sebagai bangsa yang plural.

Fakta bahwa masih rapuhnya fondasi struktur kehidupan sosial di Provinsi Lampung, dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga terkemuka, yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan The Habibie Center.

LSI dan Yayasan Denny JA merilis hasil risetnya bahwa Lampung masuk kedalam lima wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi, setelah Konflik Muslim-Kristen di Maluku; konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat; kekerasan terhadap etnis Tionghoa tahun 1998, di Jakarta; dan kekerasan terhadap kelompok penganut aliran Ahmadiyah di Mataram.⁸

Konflik berlatar etnik di Lampung Selatan yang berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2012, menelan korban tewas sebanyak 14 orang, 13 luka parah

⁷ *Ibid.*, hlm. 5-10.

⁸ Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*, (Jakarta: Inspira.co, 2014), hlm. 44.

dan 1.700 orang mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kemiling, Bandar Lampung. Sedangkan kerugian materil mencapai Rp. 24,88 miliar, dan sebanyak 532 rumah rusak dibakar.⁹

The Habibie Center melalui SNPK (Sistem Nasional Pemantau Kekerasan) merilis data bahwa berdasarkan persebaran wilayahnya, kekerasan antar kelompok berbasis identitas dominan terjadi di tiga provinsi, yakni Papua, NTB, dan Lampung. Provinsi Lampung masuk dalam kategori wilayah yang rerata insiden dengan dampak korban tewas tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.¹⁰

Berdasarkan fakta di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian tentang upaya transformasi konflik yang dilakukan di Balinuraga, Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, yaitu: 1) Kerusakan di Balinuraga menimbulkan efek mematikan dan kerugian materil yang cukup besar; 2) konflik identitas yang melibatkan kelompok tidak hanya antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga melibatkan suku lainnya; 3) kompleksitas hubungan antara migran dan penduduk lokal; 4) penyelesaian yang tidak pernah tuntas; dan 5) kompleksnya sumber konflik yang ada.

⁹ Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012, diakses pada 4 Agustus 2018.

¹⁰ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 9-10.

Sehingga muncul beberapa pertanyaan penelitian yang harus dijawab, sebagai berikut: 1) Bagaimana konflik di Balinuraga, Lampung Selatan dapat bereskalasi dari konflik laten menjadi menjadi konflik terbuka? dan 2) Bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam buku *“Social Research Method”* Alan Bryman mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah strategi penelitian yang lebih menitikberatkan pada pemakaian kata ketimbang penggunaan data-data kuantifikasi dalam proses analisis dan koleksi data.¹¹ Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kerangka Konseptual

Penulis menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep yang dikemukakan sebagai landasan berpikir dan alat analisis, sebagai berikut: Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Identitas Sosial, Teori Kerja Sama, konsep SAT, Konsep Perdamaian, dan konsep Segitiga ABC Konflik Galtung.

Teori Konflik

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin *“con”* yang artinya

¹¹ Alan Bryman, *Social Research Methods, Second Edition*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 266-270.

“bersama” dan *“fligere”* yang berarti “benturan atau tabrakan.”¹² Sedangkan, Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai suatu proses mencapai tujuan dan kepentingan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.¹³

Dahrendorf sendiri melihat masyarakat dalam dua rupa, yaitu konflik dan konsensus. Menurutnya, sebuah masyarakat tidak akan mengalami konflik jika tidak ada konsensus sebelumnya. Misalnya, kelompok A dan kelompok B tidak akan terlibat dalam konflik karena belum pernah hidup bersama dan tidak mengenal satu sama lain. Begitupun sebaliknya, konflik dapat mengantarkan kita terhadap konsensus. Contohnya, kerja sama atau aliansi yang saat ini dibangun oleh Amerika Serikat dan Jepang adalah hasil konsensus yang dibangun pasca terlibat dalam konflik dan perang besar pada masa Perang Dunia II.¹⁴

Melalui sudut pandang yang dibangun Teori Konflik, penulis akan menganalisis bagaimana konflik yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan mampu membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial yang ada.

¹² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.99.

¹⁴ Selvie M. Tumengkol, “Teori Sosiologi Perspektif tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri”, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Manado, 2012.

Segitiga ABC Konflik Galtung

Dalam buku, “*Peace by Peaceful Means*”, Galtung merumuskan bahwa konflik merupakan bangunan triadik yang tersusun atas tiga elemen, yaitu C (*conflict*) = A (*attitudes*) + B (*behaviour*) + C (*contradiction*).¹⁵ Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antitesis dari perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok liyan. Pola relasi yang demikian muncul karena adanya kontradiksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*).¹⁶

Penulis menggunakan konsep Segitiga ABC Konflik Johan Galtung untuk menganalisis proses eskalasi konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, dari konflik yang awalnya bersifat laten menjadi konflik terbuka pada tanggal 27-29 Oktober 2012.

Konsep Perdamaian

Damai dalam perspektif Galtung diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *negative peace* (damai negatif) dan *positive peace* (damai positif).¹⁷ Perdamaian negatif didefinisikan sebagai

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁶ Charles Webel & Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York, Routledge, 2007), hlm. 71.

¹⁷ Suadi Zainal, “Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No.1, 2016, hlm. 84-85.

suatu keadaan damai tanpa adanya kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sedangkan perdamaian positif merujuk pada suatu kondisi dimana terdapat nilai-nilai (*value*) yang secara umum disepakati bersama oleh setiap entitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu, seperti bebas dari rasa takut (*free of fears*), pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kerja sama, bebas dari eksploitasi, ada persamaan hak dan kesempatan, keadilan, pluralisme, partisipasi, bebas bertindak dan wujud keadilan sosial lainnya.¹⁸

Penulis menggunakan konsep perdamaian sebagai alat sekaligus indikator untuk melihat apakah proses transformasi konflik sosial antar etnis di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan berjalan dengan baik sehingga memunculkan perdamaian yang berkelanjutan.

Transformasi Konflik

Untuk menganalisis konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, penulis menggunakan teori transformasi konflik sebagai tahapan rekonstruksi pasca konflik yang muncul setelah upaya resolusi konflik dilakukan. Teori ini dipopulerkan oleh Lederach melalui karya-karyanya yang mengasumsikan bahwa dinamika pasang dan surut konflik sosial memberi peluang dan ruang dalam kehidupan, untuk melakukan suatu perubahan yang bersifat konstruktif, guna meminimalisir

¹⁸ *Ibid.*

Tabel 1 Teori Transformasi Konflik

Teori	Variabel	Indikator
Transformasi Konflik	Transformasi Personal	1) Perubahan sikap 2) Perubahan perilaku
	Transformasi Relasional	1) Pola komunikasi 2) Kerja sama 3) Pembuatan keputusan 4) Mekanisme penanganan konflik
	Transformasi Struktural	1) Kondisi sosial (Kata kunci: disparitas, ketidaksetaraan, diskriminasi rasial, agama, dan etnik) 2) Pola prosedural (Kata kunci: kurangnya transparansi, kesetaraan, akses, partisipasi, keadilan) 3) Pola institusional (Kata kunci: kurangnya akses, pola sejarah)
	Transformasi Kultural	1) Penggunaan pola dan sumber daya kultural

Sumber: Diolah oleh peneliti merujuk pada panduan transformasi konflik dalam John Paul Lederach, et al., *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*, (Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, 2007)

angka kekerasan dan mendorong terwujudnya keadilan yang merata dalam berbagai sektor kehidupan sosial.¹⁹ Transformasi konflik bertumpu pada upaya menciptakan perubahan hubungan dalam konflik dan pembangunan pasca konflik, bukan mengendalikan terlebih menihilkan konflik. Merujuk pada pemikiran John. P. Lederach bahwa dalam transformasi konflik setidaknya ada empat elemen pokok yang harus ditransformasikan, yaitu: 1) transformasi personal; 2) transformasi relasional; 3) transformasi kultural; dan 4) transformasi struktural.²⁰

¹⁹“Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice, in direct action and social structures, and respond to real-life problems in human relationships”. Lihat John P. Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation of the Guiding Principles by a Pioneer in the Field*, (United States: Good Books, 2003), hlm. 16.

²⁰ J. P. Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, (STL: Distribution North America,

Teori Identitas Sosial

Identitas memainkan peran yang sangat vital dalam konflik sosial. Identitas juga merupakan basis fundamental bagaimana cara seorang individu atau kelompok melihat dan memahami diri mereka dalam situasi konflik.²¹ Identitas dapat menggambarkan siapa “kita” dan siapa “mereka”, mampu memobilisasi individu dan kelompok, serta memberikan legitimasi dan justifikasi atas aspirasi seseorang atau kelompok.²²

Ho-Won Jeong dalam bukunya yang berjudul, “*Conflict Management and Resolution*”, memperkuat pendapat di atas bahwa dalam situasi konflik, formasi identitas dibentuk oleh

2003), hlm. 24-27, dalam Suadi Zainal, *op. cit.*, hlm, 85-86.

²¹ Celia Cook-Huffman, “The Role of Identity in Conflict”, dalam Dennis J. D. Sandole et.al., (ed), *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, (New York: Routledge, 2011), hlm. 19-30.

²² *Ibid.*

konteks permusuhan antar kelompok. Menguatnya kohesivitas dan soliditas dalam suatu kelompok akan membangun eksklusivitas yang merangsang munculnya rasa keterancaman (*security dilemma*, dalam bahasa penulis) terhadap kelompok lain sehingga dapat mendorong pada arah permusuhan. Dampaknya adalah identitas kemudian dijadikan sebagai komoditas atau sumber yang paling efektif untuk memobilisasi kelompok karena dirasa adanya ketidakadilan serta perampasan hak dalam sebuah persaingan.²³

Tajfel merumuskan identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri yang datang dari keanggotaan dalam sebuah kelompok bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dalam keanggotaan tersebut.²⁴ Penulis menggunakan Teori identitas sosial Tajfel dan Turner untuk menjelaskan bagaimana identitas dapat dijadikan sebagai komoditi efektif untuk memobilisasi massa (suku Lampung) dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung yang secara bersama-sama melakukan penyerangan secara sporadis terhadap etnik Bali di Desa Balinuraga.

²³ Identitas biasanya digolongkan berdasarkan etnik, suku, kelas, kasta, gender, dan ras, sering digunakan sebagai legitimasi dan justifikasi terhadap ketidakadilan distribusi sumber daya dan serta penindasan secara politik. Lihat Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: an Introduction*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 60.

²⁴ H. Turner, "Social Stereotypes and Social Groups", dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.), *Inergroup Behaviour*, (Oxford: Basil Blackwell, 1981).

Konsep SAT

Penulis menggunakan model analisa SAT ini untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan faktor konfliknya, yang mencakup tiga elemen utama, yaitu *pertama*, akar konflik atau faktor struktural, yaitu adalah faktor-faktor atau 'latar belakang' yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Faktor-faktor ini bisa meliputi eksklusi politik secara sistematis, kesenjangan ekonomi yang inheren, ketiadaan institusi yang memadai dan responsif, pergeseran dalam hal keseimbangan demografis, kemerosotan ekonomi, dan kerusakan ekologis terhadap wilayah.²⁵

Kedua, akselerator. Dalam terminologi Ichsan Malik, akselerator ini diibaratkan sebagai katalisator atau angin panas yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah.²⁶ Masih menurut Ichsan bahwa akselerator merupakan manifestasi suatu reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik.

Dan terakhir *ketiga*, faktor pemicu, yaitu kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik. Dalam bahasa yang mudah dipahami Ichsan Malik secara sederhana menganalogikan *trigger* sebagai elemen "api" yang dapat menyambar dan menghanguskan

²⁵ Muhammad Miqdad, et al, *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, CEWERS, (Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS, 2012), hlm. 31-37.

²⁶ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 234.

“hamparan rumput kering” (elemen struktural). Biasanya *trigger* muncul secara tiba-tiba dalam rangkaian kejadian konflik.²⁷ Contoh dari pemicu adalah pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik. Sebagai misal, pembunuhan tokoh atau pemimpin kelompok tertentu, perusakan simbol-simbol identitas dan lain sebagainya. Pemicu bersifat jangka pendek dan sporadis.²⁸

Ketiga elemen ini akan sangat membantu penulis untuk memahami situasi atau prakondisi yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Terulangnya konflik Lampung di Balinuraga, menjadi indikator gagalnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, yang dinilai tidak mampu mencegah terjadinya konflik kekerasan yang melibatkan etnis Bali dan penduduk lokal Lampung. Aparat keamanan gagal dalam mende-eskalasi ketegangan dan mencegah konflik kekerasan karena intervensi dilakukan setelah konflik mulai meluas.²⁹

Pemerintah Daerah dianggap gagal dalam melakukan upaya penanganan konflik sosial di Balinuraga seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7 tahun

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Miqdad, *et al*, *op. cit.*

²⁹ Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

2012 tentang penanganan konflik sosial, yaitu seyogianya pemerintah harus melakukan: *Pertama*, upaya pencegahan (pasal 1), dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Namun, realisasinya lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) belum dimaksimalkan perannya karena kurangnya sumber daya dan anggaran; *kedua*, penghentian konflik dalam pasal 12; dan *ketiga*, pemulihan pasca konflik yang meliputi tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah dalam hal ini gagal dalam melakukan penghentian terhadap konflik kekerasan yang terjadi karena hanya berorientasi pada upaya penghentian kekerasan, bukan penghilangan akar konflik sehingga konflik dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

Faktor-faktor Konflik

Faktor struktural. Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor konflik, dan ditinjau dari aspek sosio historis Provinsi Lampung, penulis menemukan bahwa transmigrasi penduduk sebagai latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial di Provinsi Lampung terutama konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi yang dijalankan mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga masa reformasi,

ternyata meninggalkan persoalan besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Kondisi semacam ini secara signifikan berpengaruh terhadap dominasi pendatang, yang secara statistik, populasinya lebih besar dibandingkan penduduk lokal Lampung yang hanya sekitar 11,92% dari jumlah total penduduk Provinsi Lampung saat ini. Implikasi migrasi dan pergeseran dominasi adalah bentuk kemunduran etnik lokal.

Ketidakseimbangan proporsi tersebut membuat etnik Lampung terdesak oleh pendatang yang berkembang dan menguasai sumber-sumber strategis seperti ekonomi, lahan, dan dunia pendidikan. Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung, Nina Yuda mengatakan bahwa dalam kultur kehidupan orang Lampung memiliki gelar adat merupakan bagian dari keistimewaan dan harga diri yang disebut sebagai *Pi'il Pesenggiri*. Tinggi rendahnya *Pi'il Pesenggiri* seseorang sedikitnya ditunjukkan pada tiga hal yang saling berelasi, yaitu *adok* (gelar), perempuan dan harta. Bagi sebagian orang, kuatnya keinginan mendapatkan *adok* membuat mereka rela berkorban harta benda. *Ber-adok*, dinilai salah satu pencapaian *pi'il pesenggiri*. Mahalnya biaya *begawi adok* bahkan menelan hingga ratusan juta. Akibatnya setelah pesta usai, *adok* didapat, konsekuensinya jatuh miskin. Tanah-tanah pusaka, warisan banyak yang dijual demi melaksanakan ritual tersebut. Terjadilah peralihan aset-aset ekonomi dari suku Lampung terhadap penduduk

pendatang, seperti Bali.³⁰

Selain itu, transmigrasi juga menciptakan eksklusivitas antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Faktanya bahwa para pendatang itu hidup persis seperti di Jawa, di bawah pamong desa sendiri dan dalam susunan masyarakat sendiri. Struktur sosial yang berbentuk *enklaf-enklaf* kedaerahan tersebut menimbulkan pertentangan antara pendatang dan pribumi, sehingga menimbulkan friksi diantara keduanya.

Kemudian, ini diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif. Pemerintah memberikan alokasi-alokasi tanah kepada para agro-bisnis raksasa sehingga seluruh "*hinterland*", daerah penyangga kediaman suku Lampung yang secara tradisional merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah, praktis tidak ada yang tersisa. Akibatnya sebagian besar suku asli Lampung terjepit dari segala arah. Sejalan dengan dalil demografis yang menyatakan, bahwa "suatu puak atau suku bangsa yang kemudian menjadi minoritas (mutlak) di dalam habitatnya sendiri, lambat atau cepat berkecenderungan akan menuju kepada kepunahannya".³¹ Misalnya saja suku bangsa *Indian* di benua Amerika, *Aborigin* di Australia dan *Maori* di Selandia Baru adalah contoh sebagian kecil suku bangsa yang menjadi minoritas di tanahnya sendiri, tergempur

³⁰ Wawancara dengan Dr. Nina Yuda selaku Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung pada tanggal 24 September 2018 di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.

³¹ Jusuf Badri, *Raden Intan: Jati Diri Kepahlawanan Orang Lampung*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi, 2002), hlm. 17.

oleh dinamika deras nya arus masuk para transmigran yang kemudian menjadi mayoritas dengan segala kemajuan yang dimilikinya.

Faktor akselerator. Terjadinya rentetan konflik sejak tahun 2005 hingga Oktober 2012 antara warga Bali dengan suku asli Lampung menjadi katalisator yang menyebabkan intensitas konflik semakin membesar karena dendam yang sudah mengakar. Akibatnya, sentimen dan ego kelompok dikedepankan, solidaritas sosial internal (*ingroup*) menguat melebihi batas-batas wilayah komunitas inti konflik.

Pada tahap ini, identitas kesukuan menjadi momok yang menakutkan. Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul, “*Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*” menyatakan, bahwa:

“...memiliki suatu identitas tidak hanya menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Namun demikian, identitas juga dapat memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia”.³²

Fenomena konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung di Balinuraga pada Oktober 2012 silam menguatkan tesis Amartya Sen, bahwa permusuhan yang timbul dari eksklusivitas bisa berjalan bergandengan dengan manfaat yang timbul dari sikap eksklusif.³³ Eksklusivitas dalam sebuah kelompok dapat melahirkan kohesis sosial *ingroup* yang semakin kuat dan sikap *altruistik*

³² Amartya Sen, *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*, (penerjemah: Arif Susanto), (Serpong: Marjin Kiri, 2007), hlm. 3-4.

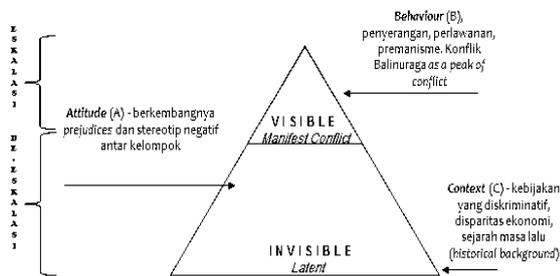
³³ Amartya Sen, *op. cit.*

untuk membela kelompoknya, tetapi sebaliknya memperlebar *social distance* dan jurang perbedaan dengan kelompok lain (*outgroups*) yang bertendensi menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap orang di luar kelompoknya.

Faktor pemicu. Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga Kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan dipicu oleh permasalahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis suku Lampung. Mengapa hal yang sepele demikian dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar? Jika ditinjau lebih dalam tentang pandangan hidup masyarakat suku Lampung antara lain terhadap kaum wanitanya yang sangat digarisbawahi. Bukan dalam arti emansipatoris modern, tetapi dalam arti tradisional, dimana kehormatan serta kedudukan seorang wanita sangat dinjunjung tinggi. Ini antara lain dilambangkan dalam tarian adat Lampung yang disebut NIGEL atau Tigel-Tari: wanita dalam pakaian adat lengkap berdiri tegak dan tidak bergerak di atas sebuah talem kuning, *brass salvers*, kecuali jari-jemarinya yang bertanggung bergerak-gerak lambat mengikuti irama gamelan Lampung yang sedang ditabuh, sedangkan beberapa orang prianya, juga dengan pakaian adat lengkap, termasuk penyandangan keris yang hulunya dihadapkan kedepan, berputar-putar lincah bersemangat mengitari sang gadis. Ini mencitrakan tekad bulat tanpa kompromi dalam bentuk apapun juga, siap sedia mempertahankan kesucian serta kehormatan sang gadis.

Eskalasi Konflik Laten Menjadi Konflik Terbuka

Gambar 1. Analisis Eskalasi Konflik Balinuraga Dengan ABC Triangle J. Galtung



Sumber: Diolah oleh peneliti merujuk pada panduan Scottish Centre for Conflict Resolution, *Improving Relationships, Improving Lives*.

Situasi ini terjadi, karena mereka (suku Lampung) merasa adanya urgensi terhadap penyelesaian suatu masalah yang dianggap begitu serius, namun pemerintah cenderung bersikap abai dan lamban. Akibatnya penyelesaian selalu tertunda dan tidak pernah menyentuh hingga ke akar-akarnya, terjadilah akumulasi kekecewaan. Maka suatu ketika muncul pemicunya, akan ada luapan kemarahan dan perlawanan (agresi) yang diperkeruh dengan kondisi objektif (konteks) yang melatarinya, yaitu berupa kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang diskriminatif, serta kondisi yang menyebabkan mereka (suku Lampung) teralienasi dari tanahnya sendiri.

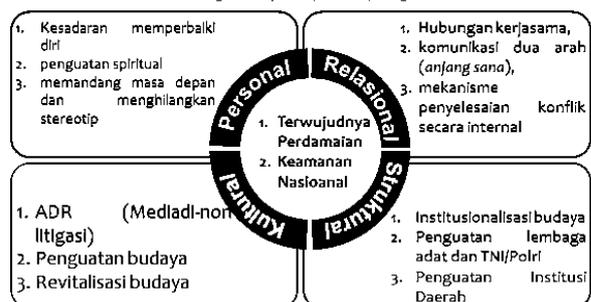
Kondisi yang demikian menjadi sebab munculnya frustrasi, dan frustrasi muncul karena perasaan tidak puas (*deprivasi relative*), yaitu adanya kontradiksi antara *das sollen* (yang diharapkan, *attitude (A)*) dengan *das sein* (kenyataan yang dialami, konteks (C)). Jika *deprivasi relative* suatu

kelompok tidak ditanggapi, maka akan meningkatkan rasa frustrasi. Semakin frustrasi akan semakin marah, dan dalam keadaan marah konflik laten bertendensi besar mencuat menjadi konflik terbuka (*Behaviour (B)*) yang biasanya disertai dengan tindak kekerasan disebut *destructive conflict*.

Transformasi Konflik

Umumnya konflik sosial menyebabkan perubahan terhadap empat dimensi, yaitu personal, relasional, struktural dan kultural. Pasca terjadinya konflik sosial antaretnik Bali dan Lampung di Balinuraga terdapat banyak perubahan baik dalam pola hubungan personal, interpersonal, intrakomunal dan interkomunal, mulai ada penguatan budaya, revitalisasi identitas, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian sosial guna memperkokoh ketahanan sosial.³⁴

Gambar 2. Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan



Sumber: Diolah oleh penulis merujuk pada panduan transformasi konflik dalam John Paul Lederach, et al. *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*, (Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, 2007)

³⁴ Hartoyo, "Memutus Mata Rantai Konflik di Lampung", dalam *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 34.

Transformasi personal. Pasca berakhirnya konflik kekerasan di Balinuraga pada tanggal 29 Oktober 2012, berbagai pihak mengakui telah banyak perubahan sikap dan perilaku baik secara personal maupun komunal di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini tergambar dalam penjelasan yang dituturkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Agom saat penulis temui di Kantor Desa Agom bahwa:

*“...sekarang memang sudah agak berkurang, kalo misal hiburan organ tunggal sekarang orang Balinya udah gak kaya dulu lah istilahnya, menguasai panggung. Bahkan sekarang keliatannya udah gak ada lagi. Jadi betul-betul ada perubahan hubungan yang signifikan pasca terjadinya konflik. Setelah konflik ini jelas betul perubahannya, kalau seperti dulu misalnya mereka (orang Bali) kalo ke pasar aja udah kaya seenaknya sendiri geber-geber itu. Sekarang setau saya udah jarang orang Bali yang mau kesini. Tapi walaupun kita lewat kesanapun gak ada masalah orang Jawa, Lampung, asal kita memang sudah tau mereka, sekarang gak terjadi konflik lagi lah. Gak saling ngeliatin gitu itu, gak sekarang! kalo dulu memang pernah seperti itu. Kalo misal kita lewat dia ngeliat aja udah marah bawaannya. Kalo sekarang, semenjak konflik itu hingga sekarang belum pernah kejadian. Jadi bisa membatasi diri sekarang”.*³⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari pemerintahan desa, kecamatan, kesbangpol, warga dan akademisi. Perubahan sikap dan perilaku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa konflik tidak akan meninggalkan efek positif, melainkan justru menimbulkan

³⁵ Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom pada tanggal 5 Oktober 2018.

dampak kerugian bagi kedua belah pihak, baik kerugian materil maupun korban jiwa.

Transformasi relasional. Tujuan utama dari transformasi relasional adalah menciptakan hubungan antara kelompok yang berbeda dalam suatu lingkungan kemasayarakatan. Ilmuwan evolusi sosial, Alexander mengungkapkan bahwa *altruisme* dan *kerjasama* merupakan produk yang dihasilkan dari sejarah konflik antar kelompok dan perang, yang kemudian secara alami membentuk psikologi dan perilaku manusia.³⁶ Hal ini sejalan dengan penganut aliran pemikiran Strukturalis Marxist yang mengatakan, bahwa untuk mencapai suatu perubahan yang besar (*radical change*) dalam sistem kehidupan membutuhkan pendekatan revolusioner, yaitu untuk menghentikan konflik dibuat konflik yang lebih besar.³⁷

Maka pasca terjadi konflik, kedua belah pihak mulai sadar bahwa damai itu penting. Muncullah kerjasama sebagai bentuk kesadaran bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar melampaui kepentingan personal dan kelompok yaitu menciptakan harmoni dalam hidup berdampingan sesama warga Lampung.

Tingkat komunikasi yang terjalin baik pada level individu atau kelompok, antara warga Bali di Balinuraga dan warga suku Lampung di Desa Agom,

³⁶ M. V. Vugt, Gremer, D. D., & Janssen, S. P. “Gender Differences In Cooperation and Competition”, *Research Report, Association For Psychological Science*, Vol. 18 (1), 2007, hlm, 19-23.

³⁷ Thania Paffenholz, “Understanding Peace-building Theory: Management, resolution and transformation”, *New Routes A Journal of Peace Research and Action*, Vol. 14 (2), 2009, hlm. 3.

sudah cukup baik. Berdasarkan pada data lapangan dan hasil penelitian, telah tercipta hubungan kerjasama terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Agom tahun 2012, Muchsin Syukurmenuturkan bahwa warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. Pohon kelapa yang banyak tumbuh di lingkungan Desa Agom tidak akan bernilai ekonomis tanpa keberadaan masyarakat Bali. Made Santre, Kepala Desa Balinuraga, saat diwawancarai pada 5 Oktober 2018 mengungkapkan bahwa kerjasama yang sebelum terjadi konflik sudah baik, pasca terjadinya konflik hubungan sosial kerjasama dan kemasyarakatan juga sudah normal kembali.

Pada level komunal, hubungan dirajut kembali melalui sistem *anjang sana* yaitu saling bersilaturahmi antara tokoh adat Bali, Lampung dan suku lainnya, tokoh pemuda, tokoh agama, dan aparat pemerintah desa. Misalnya saja di Kecamatan Way Panji, pemerintah telah berupaya menciptakan kegiatan di masing-masing adat, seperti mengundang tokoh adat, baik dari suku Lampung, Bali, Jawa atau suku lainnya, saat ada acara hajatan dan acara adat suku tertentu.

Transformasi kultural. Di Lampung terdapat beragam alternatif penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution/ADR*) yang mengedepankan jalan penyelesaian non-litigasi. Mediasi melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai mufakat masih menjadi cara yang paling efisien dan terus dikembangkan. Kecenderungan menggunakan mediasi

sebagai alternatif penyelesaian konflik, selain dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar hubungan sosial yang bersifat konsensus, juga karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosio kultural setempat. Dalam hal ini peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tradisi, kepercayaan, struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama pada tingkat desa dan kecamatan masih sangat diperlukan, karena masih kuat pengaruhnya serta menjadi elemen utama penyelesaian konflik.

Ulu Lampung memiliki falsafah pandangan hidup ber-*pi'il pesenggiri* sebagai karakter yang masih dipegang erat dan bertahan dalam gerusan serta arus globalisasi. Begitupun warga Bali juga memiliki nilai-nilai *adiluhung* Hindu Dharma yang terangkum dalam konsep Tri Hita Karana. Meski kedua kelompok suku Bali dan suku Lampung memiliki tradisi, adat, budaya dan agama yang berbeda, namun secara garis besar falsafah pandangan hidup yang dipegang erat oleh keduanya memiliki nilai-nilai yang saling bersinggungan. Misalnya dalam adat dan tradisi, baik suku Bali maupun suku Lampung memiliki mekanisme pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama melalui jalur musyawarah atau *rembug*.

Dalam tradisi *ulu* Lampung musyawarah mufakat merupakan manifestasi dan implementasi dari falsafah *sakai sambayan* yang berarti gotong royong. Sementara dalam tradisi dan adat suku Bali, musyawarah mufakat

merupakan wujud dari nilai *salulung sebayantaka* yang biasa digunakan sebagai alat mencapai konsensus bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran.

Adanya persamaan tradisi yang dikedepankan dalam proses pencapaian kesepakatan dan penyelesaian masalah bersama melalui musyawarah. Maka pemerintah daerah Provinsi Lampung berinisiatif melakukan institusionalisasi budaya *rembug pekon* melalui Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2016 (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) sebagai mekanisme penyelesaian konflik baik pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

Transformasi struktural. Beberapa upaya transformasi secara struktural yang dilakukan pemerintah antara lain, intitusionalisasi budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik (telah dijelaskan pada sub bab transformasi kultural), penguatan lembaga adat seperti MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung), penguatan institusi keamanan TNI/POLRI melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta penguatan institusi daerah seperti Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan FOKMAL.

Pasca konflik Balinuraga, jejaring antar tokoh adat dalam penguatan struktur adat Lampung dan Bali semakin baik, serta didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Penguatan lembaga-lembaga adat ini berfungsi untuk menjadi saluran bagi kepentingan anggotanya.

Jadi ada kekuatan yang sengaja dibina untuk menjadi ruang komunikasi diantara para elit lokal suku Bali dan Lampung, misalnya sering bersilaturahmi baik secara verbal maupun langsung dengan elit-elit suku Bali, Jawa dan suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi gejolak di bawah, diantara mereka kompak, masalah dapat diredam dan pemerintah daerah tertolong dengan itu.

Evaluasi

Penulis menemukan bahwa dari keempat dimensi transformasi konflik, pemerintah daerah masih belum berhasil melakukan upaya transformasi struktural pasca konflik di Balinuraga secara optimal yang meliputi tiga elemen, yaitu kondisi sosial, pola prosedural, dan pola institusional. **Kondisi sosial** misalnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung mendapat rapor merah dalam hal diskriminasi rasial dan etnik, yaitu masih kentalnya penggunaan kekerasan atau ancaman oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok hak-hak politik (33,33), serta penggunaan kekerasan atau ancaman oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (54,17); **pola prosedural** yaitu masih kecilnya angka kebebasan berpendapat (53,47) dan pasrtisipasi politik (57,76); dan terakhir **pola institusional** yaitu belum optimalnya peran birokrasi pemerintah daerah (44,21).

Jika upaya transformasi konflik atau rekonstruksi mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (PKS), maka pemerintah telah melakukannya dengan maksimal dan optimal karena transformasi konflik hanya menekankan kepada rekonstruksi jangka pendek dan bersifat fisik. Tetapi jika rekonstruksi yang dimaksud adalah transformasi konflik dalam konsep yang dikembangkan Lederach, yaitu bagaimana menciptakan kondisi yang rusak akibat konflik menjadi kondisi yang baik, dari destruktif menjadi konstruktif, rekonstruksi yang bukan hanya aspek fisik tetapi juga menjangkau aspek sosial, psikologi, ekonomi, politik dan budaya, maka tahapan belum terjangkau secara optimal dan maksimal. Sehingga belum nampak upaya yang sifatnya terstruktur dan terencana untuk melakukan rekonstruksi dalam artian yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta dan data lapangan di atas, maka penulis mengambil satu kesimpulan bahwa perdamaian yang tercipta di Balinurga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan masih bersifat “semu” atau damai negatif. Meskipun pola hubungan kerjasama mulai berjalan dengan baik, ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak kelompok lain, dan distribusi sumberdaya semakin merata, namun masih ada beberapa *Positive Peace Index* (PPI) yang belum tercapai. Misalnya, masih lemahnya sumber daya manusia ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Lampung Selatan yang tergolong lebih rendah (66,95), dibandingkan dengan Bandar Lampung (75,98), Metro (75,87), Lampung Tengah (68,95), Pringsewu (68,61), Lampung Timur (6,05), dan Tulang Bawang (67,07).³⁸ Kemudian, tingkat keterbukaan informasi, peran birokrasi pemerintah, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih rendah dibuktikan dengan indeks demokrasi Lampung yang masuk dalam urutan 26 dengan poin 72,01 dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2017.

Apabila kondisi yang demikian tidak mendapat perhatian pemerintah, maka tidak mustahil akan muncul kekecewaan masyarakat akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa, karena akar permasalahan berupa disparitas ekonomi, diskriminasi etnik dan rasial belum terselesaikan secara tuntas. Sehingga sewaktu-waktu ada pemicu, konflik serupa sangat mungkin untuk terulang kembali.

Dengan demikian, perbaikan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perbaikan dan pembangunan menuju damai yang positif ini tentu memerlukan waktu yang panjang, dan menuntut peran aktif semua pemangku kepentingan serta andil masyarakat sebagai populasi mayoritas dalam kehidupan sosial

³⁸ Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung, *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018), hlm. 11.

Kesimpulan

1. Pecahnya konflik Balinuraga dilatari oleh beberapa faktor yaitu **faktor struktural** berupa disparitas akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang diskriminatif, serta adanya kesenjangan ekonomi yang inheren; **faktor akselerator** berupa identitas kesukuan dan belum terselesaikan secara tuntas serangkaian konflik yang terjadi sebelumnya menjadi katalisator penyebab intensitas konflik semakin membesar, selain karena dendam yang sudah mengakar; dan **faktor pemicunya** adalah kenakalan remaja.
2. Upaya transformasi konflik telah dilakukan pada empat dimensi utama yang sering dipengaruhi oleh konflik yaitu, transformasi personal ditunjukkan dengan mulai adanya kesadaran memperbaiki diri dan menghilangkan stereotip antar kelompok, serta penguatan spiritual; **transformasi relasional** dicirikan dengan mulai terjalannya kerjasama antara suku Bali dan Lampung, anjang sana, dan adanya mekanisme penyelesaian konflik secara internal; **transformasi kultural** ditunjukkan dengan adanya penguatan budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik, dan revitalisasi budaya; serta **transformasi struktural** melalui dukungan pemerintah melakukan institusionalisasi budaya *rembug pekon*, penguatan lembaga adat dan

institusi daerah, serta penguatan TNI/POLRI.

Saran

1. Pemerintah daerah harus menciptakan berbagai kegiatan yang terencana, terprogram, terpadu dan terarah sebagai acuan dalam upaya mengelola konflik (yang meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik).
2. Pemerintah daerah dapat menciptakan program pembauran antar kelompok suku bangsa atau relokasi kampung Bali secara bertahap agar terjadi proses akulturasi dan komunikasi budaya antar kelompok etnis tidak buntu, sehingga struktur sosial yang berbentuk enklaf kesukuan dapat terurai.
3. Rekonstruksi (transformasi konflik) menuntut peran aktif dari multipemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, TNI/POLRI, kesbangpol, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga adat, FKUB, FKDM dan masyarakat bawah.

Daftar Pustaka

Buku

- Badri, Jusuf. 2002. *Raden Intan: Jati Diri Kepahlawanan Orang Lampung*. Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi.
- Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Bryman, Alan. 2004. *Social Research Methods, Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Budiman, Budisantoso, et al. 2012. *Jurnalisme Damai di Lampung*, Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung.
- Huffman, Celia Cook. 2011. "The Role of Identity in Conflict". Dalam Dennis J. D. Sandole et al. (ed). *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. New York: Routledge.
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: an Introduction*. New York: Routledge.
- Lederach, J. P. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation of the Guiding Principles by a Pioneer in the Field*. United States: Good Books.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Miqdad, Muhammad, et al. 2012. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. CEWERS. Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS.
- Sen, Amartya. 2007. *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (penerjemah: Arif Susanto). Serpong: Marjin Kiri.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Turner, H. 1981. "Social Stereotypes and Social Groups". Dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Inergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell.

Webel, Charles & Galtung, Johan. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.

Jurnal

- Kajian Perdamaian dan Kebijakan. 2014. "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia". *The Habibie Center*. Edisi 06 Maret.
- Paffenholz, Thania. 2009. "Understanding Peacebuilding Theory: Management, resolution and transformation". *New Routes A Journal of Peace Research and Action*, Vol. 14. No. 2.
- Vugt, M. V., Gremer, D. D., & Janssen, S. P. 2007. "Gender Differences In Cooperation and Competition". *Research Report, Association For Psychological Science*. Vol. 18. No.1.
- Zainal, Suadi. 2016. "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi". *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. Vol. 21. No.1.

Makalah

Tumengkol, Selvie M. 2012. "Teori Sosiologi Perspektif tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri". Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Manado.

Wawancara

- Dr. Nina Yuda, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung, 24 September 2018 di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.
- Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom, 5 Oktober 2018.

Website

Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

Yayasan Denny JA dan LSI Community, “Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman”, Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012; diakses pada 4 Agustus 2018.